

BAB I

PENDAHULUAN UMUM

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik aktif, yaitu Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia, dan Lempeng Pasifik. Kondisi geologis ini menjadikan Indonesia sangat rentan terhadap berbagai bencana alam, khususnya gempa bumi, yang sering kali menimbulkan kerusakan fisik dan dampak multidimensional terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu wilayah yang terdampak signifikan adalah Dusun Aholeang, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, yang mengalami kerusakan parah akibat gempa bumi. Bencana tersebut tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga memengaruhi kesejahteraan sosial dan ekonomi warga setempat. Oleh karena itu, pemulihan pascabencana menjadi agenda penting yang memerlukan pendekatan multidisipliner, termasuk dari aspek sosial.

Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Kabupaten Majene tahun 2024, mencantumkan bahwa Kabupaten Majene memiliki skor 171,16 dengan tingkat risiko tinggi. Hal ini disebabkan karena Majene terletak di atas sesar aktif, khususnya Sesar Naik Mamuju-Majene (Mamuju *Thrust Fault*), yang memicu gempa dangkal dan memiliki potensi kuat untuk gempa besar. Peristiwa gempa 2021 yang terjadi pada 15 Januari 2021 dengan kekuatan 6,2 MM berpusat di Majene di Kecamatan Malunda yang menyebabkan kerusakan infrastruktur dengan ribuan rumah rusak, ruas jalan nasional, longsor hingga menyebabkan korban tewas.

Bencana alam seperti gempa bumi berdampak kompleks, tidak hanya pada sektor fisik tetapi juga pada struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Kehilangan tempat tinggal, rusaknya sumber penghidupan, dan melemahnya jaringan sosial merupakan tantangan besar dalam proses pemulihan pascabencana. Dalam konteks ini, modal sosial dipandang sebagai salah satu faktor kunci yang dapat mempercepat proses rekonstruksi dan rehabilitasi komunitas terdampak. Modal sosial, sebagaimana dikemukakan oleh Putnam (1993), mencakup elemen-elemen seperti jaringan sosial, norma-norma kolektif, dan kepercayaan yang memungkinkan koordinasi serta kolaborasi antarindividu dalam komunitas. Peran modal sosial dalam mendukung daya lenting (resiliensi) komunitas menjadi sangat penting dalam upaya pemulihan sosial-ekonomi.

Di Dusun Aholeang, bencana gempa bumi menyebabkan banyak warga kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian di sektor pertanian, perkebunan, dan usaha kecil. Gangguan terhadap aktivitas ekonomi ini berdampak langsung pada kestabilan keuangan masyarakat dan meningkatkan angka pengangguran.

Sementara itu, dari sisi sosial, relokasi warga dan perubahan dalam struktur pemukiman menyebabkan melemahnya hubungan sosial yang sebelumnya terbentuk erat. Ketimpangan dalam distribusi bantuan dan meningkatnya ketergantungan pada pihak luar turut memicu konflik sosial serta menurunkan tingkat solidaritas warga. Dalam situasi seperti ini, kemampuan masyarakat untuk mengandalkan jaringan sosial dan nilai-nilai lokal sangat menentukan keberhasilan pemulihan.

Modal sosial yang terbangun dalam masyarakat Aholeang mencerminkan kekuatan kultural lokal seperti gotong royong, pranata adat, dan ikatan kekerabatan yang erat. Potensi ini menjadi aset penting dalam proses pemulihan jika dikelola secara tepat. Sayangnya, penelitian terdahulu belum banyak menggali secara spesifik bagaimana peran modal sosial beroperasi dalam konteks lokal Aholeang pascabencana. Mayoritas studi cenderung fokus pada aspek material atau infrastruktur pemulihan, sementara dinamika sosial-komunitas sebagai instrumen strategis dalam rekonstruksi masih kurang dieksplorasi. *Research gap* ini menunjukkan bahwa studi tentang kontribusi modal sosial dalam pemulihan sosial-ekonomi pascagempa di wilayah ini masih terbuka lebar untuk dikaji secara lebih mendalam.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa modal sosial memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan masyarakat pasca bencana. Misalnya, studi oleh Angriani (2024) pada komunitas pemulung menegaskan pentingnya jaringan sosial dalam menciptakan strategi nafkah berkelanjutan di tengah kondisi krisis. Demikian pula, penelitian oleh Mutahar (2023) menunjukkan bahwa modal sosial membantu menjaga kesejahteraan generasi muda selama pandemi COVID-19 melalui dukungan jaringan dan norma kolektif. Namun, pendekatan terhadap modal sosial dalam konteks gempa bumi dan komunitas rural seperti Aholeang, dengan karakteristik budaya dan struktur sosial yang khas, masih belum banyak dijadikan fokus penelitian.

Keterbatasan sumber daya material dan finansial yang dihadapi masyarakat terdampak bencana semakin menegaskan pentingnya pemanfaatan modal sosial. Seperti disampaikan Aldrich (2012), dalam banyak kasus, keberhasilan pemulihan pascabencana lebih ditentukan oleh kekuatan modal sosial daripada jumlah bantuan eksternal. Komunitas dengan jaringan sosial yang kuat lebih mampu membentuk solidaritas, merancang solusi lokal, dan beradaptasi terhadap tantangan yang ada. Dengan demikian, studi tentang modal sosial tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga penting secara praktis dalam rangka merumuskan strategi pemulihan yang berbasis pada kekuatan lokal.

Struktur sosial masyarakat Aholeang yang masih mempertahankan nilai-nilai tradisional memberikan dasar yang kokoh bagi pembangunan kembali komunitas melalui pendekatan berbasis modal sosial. Peran tokoh adat, hubungan

kekerabatan, serta partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menjadi modal berharga dalam membangun kembali jaringan sosial yang sempat terganggu oleh bencana. Namun demikian, perubahan dalam struktur masyarakat akibat perpindahan penduduk dan perubahan pola nafkah berpotensi memengaruhi efektivitas modal sosial yang ada. Situasi ini menuntut kajian lebih lanjut mengenai dinamika adaptasi dan transformasi modal sosial dalam konteks pemulihan.

Sebagai studi yang memfokuskan pada konteks lokal Aholeang, pendekatan yang diusulkan dalam penelitian ini menggabungkan antara teori modal sosial dan praktik pemulihan berbasis komunitas. Dengan menelaah secara empiris bagaimana modal sosial bekerja dalam kerangka pemulihan sosial-ekonomi pascagempa, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan dalam literatur akademik serta memberikan dasar bagi kebijakan yang lebih inklusif dan partisipatif. Selain itu, temuan dari studi ini diharapkan dapat memperkaya diskursus mengenai ketahanan komunitas di wilayah rawan bencana dan memperluas pemahaman mengenai peran aktor lokal dalam proses pembangunan kembali masyarakat pasca krisis.

Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, penelitian ini berjudul **"Modal Sosial dalam Pemulihan Sosial-Ekonomi Masyarakat Aholeang Pasca Bencana Gempa Bumi di Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat"**. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memahami peran strategis modal sosial dalam proses pemulihan sosial-ekonomi masyarakat Aholeang setelah bencana gempa. Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi teoritis terhadap literatur modal sosial dalam konteks bencana serta menghasilkan rekomendasi praktis bagi pengambil kebijakan dan lembaga kemanusiaan dalam merancang strategi pemulihan yang lebih berbasis komunitas dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut dapat disimpulkan identifikasi masalah adalah:

- 1) Bagaimana dinamika dan karakteristik modal sosial masyarakat Aholeang pasca gempa?
- 2) Apa saja faktor yang menjadi tantangan dalam mempertahankan dan meningkatkan modal sosial di masyarakat Aholeang pasca gempa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Menganalisis dinamika dan karakteristik modal sosial masyarakat Aholeang pasca gempa.

- 2) Menganalisis tantangan yang dihadapi di masyarakat dalam mempertahankan modal sosial mereka saat terjadi bencana.

1.4 Ruang Lingkup Dan Batasan Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada kajian mengenai peran modal sosial dalam proses pemulihan sosial-ekonomi masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi di Dusun Aholeang, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Ruang lingkup penelitian mencakup analisis terhadap elemen-elemen utama modal sosial, seperti jaringan sosial, kepercayaan, norma kolektif, solidaritas, dan partisipasi komunitas, serta keterkaitannya dengan aktivitas pemulihan sosial-ekonomi, termasuk rekonstruksi mata pencaharian, penguatan hubungan sosial, dan ketahanan komunitas setelah bencana.

Secara geografis, studi ini dibatasi hanya pada wilayah Dusun Aholeang, tanpa mencakup desa atau kecamatan lain yang juga terdampak gempa bumi. Ruang lingkup temporal penelitian berfokus pada periode pasca bencana tahun 2021 hingga 2024, yakni masa pemulihan awal hingga tahap rekonstruksi sosial dan ekonomi yang tengah berlangsung.

Batasan penelitian ini juga mencakup beberapa hal berikut:

1. Subjek penelitian dibatasi pada masyarakat lokal yang terdampak langsung oleh bencana gempa bumi, termasuk tokoh adat, pemuka masyarakat, anggota rumah tangga, serta pelaku usaha lokal yang mengalami gangguan aktivitas ekonomi.
2. Aspek sosial-ekonomi yang dikaji terbatas pada kondisi sosial komunitas, keberlanjutan relasi sosial, serta strategi ekonomi berbasis komunitas. Penelitian tidak secara rinci membahas aspek teknis rekonstruksi infrastruktur seperti jalan, jembatan, atau bangunan fisik, kecuali dalam konteks pengaruhnya terhadap pemulihan sosial-ekonomi.
3. Modal sosial ditinjau dari sudut pandang sosiologis, khususnya melalui teori Putnam (1993), Aldrich (2012), dan Nakagawa & Shaw (2004), tanpa menjelaskan secara mendalam pendekatan psikososial atau antropologis yang lebih luas.
4. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan metode wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, sehingga hasil penelitian ini tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi ke komunitas lain secara luas, melainkan sebagai studi kasus kontekstual.

Dengan batasan dan ruang lingkup ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang spesifik dan mendalam mengenai kontribusi modal sosial dalam pemulihan komunitas Aholeang, serta memperkaya kajian ilmiah tentang peran struktur sosial lokal dalam membangun ketahanan pasca bencana.

1.5 Hasil Dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan gambaran empiris dan konseptual mengenai peran strategis modal sosial dalam mempercepat proses pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak bencana. Hasil utama yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain:

1. Identifikasi bentuk-bentuk modal sosial yang masih aktif dan potensial dalam masyarakat Aholeang pasca bencana, seperti kepercayaan antarwarga, jaringan kekerabatan, dan praktik gotong royong.
2. Analisis peran modal sosial dalam mendukung pemulihan sosial, seperti rekonstruksi hubungan sosial, kohesi komunitas, dan penguatan pranata lokal pasca relokasi.
3. Evaluasi kontribusi modal sosial terhadap pemulihan ekonomi masyarakat, termasuk dalam bentuk dukungan sosial dalam aktivitas ekonomi rumah tangga dan kolektivitas usaha kecil.
4. Pemetaan tantangan yang dihadapi masyarakat dalam mempertahankan atau membangun kembali modal sosial setelah bencana.
5. Penyusunan rekomendasi berbasis temuan lapangan untuk perumusan kebijakan pemulihan pasca bencana yang lebih inklusif dan berbasis komunitas.

Penelitian ini memiliki manfaat dalam tiga ranah utama, yaitu:

1. Manfaat Akademis. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan kajian teori tentang modal sosial dan ketahanan komunitas dalam konteks bencana alam. Hasilnya dapat memperkaya literatur sosiologi bencana dan pembangunan berbasis masyarakat, khususnya dalam konteks lokal Indonesia yang belum banyak dieksplorasi dalam penelitian sebelumnya.
2. Manfaat Praktis. Bagi pemerintah daerah, lembaga kemanusiaan, dan pihak terkait, penelitian ini memberikan landasan empiris untuk merancang program pemulihan yang lebih efektif dan partisipatif, dengan mempertimbangkan kekuatan sosial internal masyarakat seperti jaringan komunitas, tokoh lokal, dan nilai gotong royong. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan kebencanaan berbasis komunitas (community-based disaster management).
3. Manfaat Sosial. Bagi masyarakat Aholeang sendiri, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga dan memperkuat modal sosial sebagai aset utama dalam menghadapi kondisi darurat dan mempercepat pemulihan. Selain itu, dokumentasi pengalaman dan strategi komunitas dapat menjadi pembelajaran bagi komunitas lain yang menghadapi situasi serupa di masa depan.

1.6 Daftar Pustaka

Aldrich, D.P., 2012. *Building Resilience: Social Capital in Post-Disaster Recovery*. Chicago: University of Chicago Press.

Angriani, B.N., 2024. *Strategi Nafkah Berkelanjutan Berbasis Modal Sosial pada Komunitas Pemulung*. [online] Tersedia di: <https://repository.univ.ac.id> [Diakses 24 Mei 2025].

BNPB, 2024. Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2024. Tersedia di: <https://inarisk.bnpb.go.id/IRBI-2024/mobile/index.html#p=175> [Diakses 5 Agustus 2025].

Farhan, M., 2023. *Modal Sosial dan Kesejahteraan Ekonomi Generasi Milenial di Masa Pandemi COVID-19*. Jurnal Sosial Humaniora, 15(2), pp.134–148.

Nakagawa, Y. dan Shaw, R., 2004. *Social Capital: A Missing Link to Disaster Recovery*. International Journal of Mass Emergencies and Disasters, 22(1), pp.5–34.

Putnam, R.D., 1993. *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

BAB II KERANGKA KONSEPTUAL

2.1 Isu Strategis Modal Sosial Masyarakat Aholeang Pasca Bencana

Gempa Bumi

Bencana gempa bumi yang melanda wilayah Aholeang di Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, telah meninggalkan dampak signifikan tidak hanya pada aspek fisik, tetapi juga pada struktur sosial masyarakat. Dalam konteks pemulihan pasca bencana, modal sosial menjadi elemen kunci yang menentukan kecepatan dan efektivitas rekonstruksi sosial dan ekonomi. Namun, terdapat berbagai isu strategis yang muncul berkaitan dengan kondisi modal sosial masyarakat Aholeang pasca gempa.

Salah satu isu strategis yang utama adalah **terputusnya jaringan sosial** akibat relokasi warga ke tempat penampungan atau hunian sementara. Relokasi memisahkan komunitas yang sebelumnya hidup dalam ikatan kekerabatan dan kebersamaan yang erat, sehingga solidaritas dan kepercayaan antarwarga mengalami degradasi. Hal ini menghambat mobilisasi sumber daya kolektif yang diperlukan dalam proses pemulihan sosial.

Distribusi bantuan pasca bencana yang tidak merata menimbulkan **rasa ketidakadilan** di tengah masyarakat. Ketimpangan ini dapat memperlemah kepercayaan horizontal antarwarga maupun kepercayaan vertikal terhadap institusi pemerintah. Ketika rasa keadilan terganggu, maka partisipasi dalam kegiatan kolektif dan kesediaan untuk saling membantu juga ikut menurun.

Perubahan dinamika sosial pasca bencana turut memengaruhi **peran tokoh masyarakat dan pranata adat**. Dalam beberapa kasus, legitimasi tokoh lokal sebagai penggerak komunitas menjadi lemah akibat munculnya aktor-aktor eksternal (LSM, relawan, aparat) yang mengambil alih proses pemulihan. Kondisi ini menimbulkan kebingungan dalam otoritas sosial dan menurunkan efektivitas koordinasi lokal.

Kehidupan masyarakat Aholeang sebelumnya ditopang oleh nilai-nilai tradisional seperti **gotong royong**, musyawarah, dan kerja kolektif. Namun, pasca bencana, meningkatnya orientasi individualistik dalam upaya pemulihan ekonomi dan sosial menyebabkan menurunnya keterlibatan warga dalam kegiatan komunal. Hal ini menandai pergeseran nilai yang mengancam eksistensi modal sosial tradisional.

Tingginya tingkat ketergantungan terhadap bantuan pemerintah, LSM, dan pihak donor menjadikan masyarakat pasif dalam proses pemulihan. Ketergantungan ini menghambat inisiatif lokal dan **melemahkan rasa kepemilikan terhadap proses**

rekonstruksi, yang seharusnya bersifat partisipatif. Hal ini dapat memperlambat penguatan kembali jaringan sosial berbasis lokal.

Ketidakpastian dalam jangka panjang, baik secara ekonomi maupun sosial, turut memperburuk kondisi psikososial masyarakat. **Ketegangan dan konflik sosial kecil** mulai muncul dalam komunitas yang sebelumnya rukun, terutama ketika harapan pemulihan tidak sesuai kenyataan. Tekanan sosial ini dapat mengikis norma kolektif dan menghambat terbentuknya kembali kepercayaan sosial.

Kelompok rentan seperti perempuan, lansia, anak-anak, dan difabel sering kali **tidak dilibatkan secara aktif** dalam proses pengambilan keputusan pemulihan. Kurangnya inklusi ini menyebabkan proses rekonstruksi tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan komunitas secara menyeluruh, serta mempersempit ruang pembentukan modal sosial yang bersifat inklusif dan adaptif.

Isu-isu strategis di atas menunjukkan bahwa **penguatan modal sosial dalam masyarakat Aholeang pasca gempa tidak dapat berjalan otomatis**. Diperlukan strategi pemulihan yang berbasis komunitas dan memperkuat kembali jaringan sosial, norma kolektif, serta kepercayaan antarwarga. Tanpa penanganan serius terhadap isu-isu ini, proses pemulihan akan berjalan lambat dan berisiko gagal dalam jangka panjang.

2.2 Studi Empirik Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai peran modal sosial dalam konteks pemulihan pasca bencana telah dilakukan oleh sejumlah peneliti sebelumnya, baik dalam konteks nasional maupun internasional. Studi-studi ini menunjukkan bahwa modal sosial merupakan aset non-material yang sangat penting dalam mempercepat rekonstruksi dan meningkatkan ketahanan komunitas.

1. Aldrich (2012) – *Building Resilience: Social Capital in Post-Disaster Recovery*

Dalam bukunya, Aldrich meneliti berbagai kasus bencana besar seperti tsunami di Jepang dan badai Katrina di Amerika Serikat. Ia menyimpulkan bahwa daerah dengan tingkat modal sosial yang tinggi menunjukkan kemampuan pemulihan yang lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan daerah yang hanya mengandalkan bantuan material. Penelitian ini menegaskan bahwa jaringan sosial, kepercayaan, dan solidaritas menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pemulihan komunitas.

2. Nakagawa dan Shaw (2004) – *Social Capital: A Missing Link to Disaster Recovery*

Studi ini mengkaji bagaimana modal sosial dapat menjadi jembatan penting dalam mengisi kesenjangan antara bantuan eksternal dan kebutuhan masyarakat lokal. Penelitian ini dilakukan di beberapa wilayah Asia, dan hasilnya menunjukkan bahwa komunitas dengan partisipasi sosial yang tinggi mampu lebih efektif dalam mengelola bantuan, memulihkan infrastruktur sosial, dan membangun kembali kepercayaan antarwarga.

3. Bitu Nurul Angriani (2024) – *Strategi Nafkah Berkelanjutan Berbasis Modal Sosial pada Komunitas Pemulung*

Penelitian ini mengungkapkan bahwa komunitas pemulung yang memiliki jaringan sosial yang kuat mampu bertahan secara ekonomi dalam kondisi sulit. Melalui mekanisme pertukaran informal, dukungan kelompok, dan saling percaya, mereka membangun ketahanan ekonomi yang tidak bergantung pada sistem formal. Temuan ini relevan dengan konteks pemulihan masyarakat terdampak bencana yang sering kali kehilangan akses terhadap dukungan formal.

4. Farhan Mutahar (2023) – *Modal Sosial dan Kesejahteraan Ekonomi Generasi Milenial di Masa Pandemi COVID-19*

Penelitian ini meneliti kontribusi jaringan sosial terhadap stabilitas ekonomi individu selama krisis pandemi. Hasilnya menunjukkan bahwa generasi muda yang terhubung dengan komunitas sosial yang kohesif lebih mampu mempertahankan kesejahteraan ekonomi melalui kolaborasi, berbagi informasi peluang kerja, dan dukungan emosional. Konsep ini bisa diadaptasi untuk menjelaskan bagaimana komunitas pascabencana mengatur ulang hubungan ekonomi mereka secara sosial.

5. Fatimah dan Hadi (2021) – *Modal Sosial dan Pemulihan Sosial Korban Bencana Banjir di Kalimantan Selatan*

Penelitian ini menekankan pentingnya nilai-nilai lokal dan kebudayaan dalam memperkuat jaringan sosial pasca bencana. Dalam konteks Kalimantan Selatan, relasi kekerabatan dan adat lokal membantu masyarakat bangkit dari krisis melalui kerja sama dan musyawarah dalam membangun kembali lingkungan dan kehidupan ekonomi. Studi ini relevan dalam memahami konteks masyarakat Aholeang yang juga memiliki nilai budaya lokal yang kuat.

6. Putnam (1993) – *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*

Meskipun bukan studi tentang bencana, buku ini menjadi dasar teoritis utama dalam kajian modal sosial. Putnam menunjukkan bahwa efektivitas pemerintahan lokal sangat bergantung pada seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam jejaring sosial dan keberadaan norma-norma kolektif yang mendorong kerja sama. Kerangka ini menjadi fondasi dalam menilai potensi dan hambatan pemulihan komunitas berbasis modal sosial.

7. Qadriina, Herdiansyah, & Aryo (2024) – *Studi Gempa Cianjur 2022*

Penelitian ini menganalisis peran modal sosial dalam pemulihan masyarakat pasca gempa Cianjur 2022. Hasilnya menunjukkan bahwa modal sosial berperan signifikan dalam mendorong pemulihan berbasis komunitas, memfasilitasi bantuan keuangan, dan mengidentifikasi potensi konflik yang dapat menghambat pemulihan. Studi ini menekankan pentingnya pengelolaan modal sosial yang tepat untuk mendukung proses pemulihan yang efektif.

8. Stiawan (2017) – Analisis Statistik Pemulihan Pasca Bencana di Indonesia

Menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini mengevaluasi pengaruh modal sosial terhadap durasi tinggal korban di hunian sementara dan proses rekonstruksi perumahan. Hasilnya menunjukkan bahwa partisipasi dalam pemilihan kepala desa memiliki hubungan positif dengan durasi tinggal di hunian sementara, namun modal sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap pilihan rekonstruksi perumahan, yang lebih dipengaruhi oleh faktor keuangan.

9. Hidayati (2018) – Studi di Bantul dan Jambi

Penelitian ini menyoroti peran modal sosial dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana dan proses pemulihan pasca bencana. Studi ini menekankan pentingnya kearifan lokal, pengalaman sebelumnya, dan re-establishing mata pencaharian komunitas dalam memperkuat ketahanan masyarakat.

10. Nugraha et al. (2023) – Studi di Desa Ponggok

Penelitian ini menggunakan pendekatan PLS-SEM untuk menganalisis peran modal sosial dalam ketahanan komunitas di daerah pedesaan. Hasilnya menunjukkan bahwa modal sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap tindakan kolektif masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana, dengan kontribusi sebesar 31,6% terhadap ketahanan komunitas.

11. Akbar & Kusumasari (2014) – Studi di Desa Wukirsari, Bantul

Penelitian ini mengkaji bagaimana perempuan pelaku usaha di Desa Wukirsari memanfaatkan modal sosial dalam pemulihan sosial dan ekonomi pasca gempa bumi 2006. Hasilnya menunjukkan bahwa mereka mampu membangun jaringan internal dan eksternal yang kuat, memanfaatkan modal sosial bonding, bridging, dan linking untuk memulihkan kondisi sosial ekonomi secara mandiri.

12. Perwira (2013) – Studi di Dusun Deles, Klaten

Penelitian ini meneliti peran modal sosial dalam pemulihan tatanan sosial dan ekonomi pasca erupsi Merapi 2010. Hasilnya menunjukkan bahwa modal sosial berperan penting dalam memperkuat solidaritas, kepercayaan, dan kerja sama antarwarga dalam proses pemulihan.

Berdasarkan kajian-kajian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa modal sosial berperan penting dalam:

1. Memfasilitasi pertukaran informasi dan koordinasi lokal;
2. Memperkuat dukungan emosional dan ekonomi di tengah keterbatasan bantuan formal;
3. Menjembatani hubungan antara masyarakat dan aktor eksternal;
4. Mengurangi risiko konflik sosial dalam situasi pasca krisis.

Studi-studi di atas menunjukkan bahwa modal sosial memainkan peran krusial dalam proses pemulihan pasca bencana di berbagai konteks di Indonesia. Modal

sosial dapat mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi, memperkuat ketahanan komunitas, serta memfasilitasi tindakan kolektif yang efektif. Namun, pengaruh modal sosial dapat bervariasi tergantung pada konteks lokal, jenis bencana, dan karakteristik komunitas yang terdampak.

Dalam konteks masyarakat Aholeang, yang memiliki struktur sosial berbasis nilai-nilai tradisional dan hubungan kekerabatan yang erat, studi ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan penelitian dengan mengeksplorasi secara mendalam peran modal sosial dalam pemulihan sosial-ekonomi pasca gempa bumi. Dengan memahami dinamika modal sosial di Aholeang, diharapkan dapat dirumuskan strategi pemulihan yang lebih efektif dan kontekstual.

Namun demikian, sebagian besar studi tersebut belum secara spesifik meneliti konteks lokal masyarakat Aholeang, yang memiliki struktur sosial dan budaya unik. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi *research gap* dengan mengkaji peran modal sosial dalam pemulihan sosial-ekonomi secara kontekstual dan mendalam di wilayah yang relatif kurang terekspos dalam literatur akademik.

2.3 Modal Sosial

2.3.1. Pengertian Modal Sosial

Modal sosial merupakan konsep yang merujuk pada jaringan sosial, kepercayaan, serta norma yang memungkinkan individu dan kelompok bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama (Santoso, 2020: 15). Modal sosial berfungsi sebagai sumber daya yang dapat digunakan untuk memperkuat solidaritas sosial dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pembangunan masyarakat dan pengelolaan bencana (Sayuti et al., 2024: 2).

Pierre Bourdieu (1986) mendefinisikan modal sosial sebagai "jumlah sumber daya aktual dan potensial yang terkait dengan kepemilikan jaringan hubungan yang langgeng" (Santoso, 2020: 28). Sementara itu, James Coleman (1988) mengaitkan modal sosial dengan nilai-nilai kepercayaan dan norma yang mendorong individu untuk berpartisipasi dalam tindakan kolektif (Santoso, 2020: 30). Robert Putnam (2000) lebih lanjut menekankan bahwa modal sosial berkaitan dengan partisipasi warga dalam berbagai organisasi sosial yang meningkatkan kohesi sosial (Sayuti et al., 2024: 3).

Modal sosial merupakan sumber daya yang muncul dari hubungan sosial yang terjalin dalam masyarakat. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Loury dalam konteks pengembangan manusia, kemudian dikembangkan oleh Coleman dan Putnam. Coleman (1988) menjelaskan bahwa modal sosial adalah suatu bentuk modal yang terbentuk dari kewajiban, harapan, dan kepercayaan dalam interaksi sosial. Sementara itu, Putnam (2000) menekankan bahwa modal sosial berperan dalam memperkuat kohesi sosial dan mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan kolektif. Dengan adanya modal sosial, individu dalam suatu komunitas

dapat saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan meningkatkan kesejahteraan kolektif (Farhan Mutahar, 2023: 21-22).

Dalam masyarakat, modal sosial dapat berbentuk jaringan sosial, kepercayaan, serta norma dan nilai yang mengatur hubungan antarindividu. Kepercayaan merupakan elemen kunci dalam modal sosial karena menjadi dasar bagi kerja sama yang berkelanjutan. Fukuyama (1995) menegaskan bahwa kepercayaan sosial yang tinggi dalam suatu komunitas akan meningkatkan efektivitas kerja sama serta memperkuat stabilitas sosial dan ekonomi. Di sisi lain, jaringan sosial memberikan akses terhadap sumber daya dan informasi yang penting bagi individu maupun kelompok, seperti dalam konteks kesempatan kerja atau akses terhadap layanan sosial. Oleh karena itu, semakin kuat jaringan sosial dalam suatu komunitas, semakin tinggi pula modal sosial yang dimilikinya (Bitu Nurul Angraini, 2024: 27-28).

Selain kepercayaan dan jaringan sosial, norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat juga menjadi faktor penting dalam modal sosial. Norma sosial berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang memastikan individu bertindak sesuai dengan aturan yang disepakati bersama. Menurut Hasbullah (2006), modal sosial mencakup enam unsur utama, yaitu partisipasi dalam jaringan, timbal balik (reciprocity), kepercayaan (trust), norma sosial, nilai-nilai, serta tindakan proaktif. Nilai-nilai sosial yang kuat dalam suatu komunitas akan mendorong kerja sama yang lebih erat dan memperkuat solidaritas sosial. Modal sosial yang tinggi dalam suatu masyarakat juga berkontribusi terhadap efektivitas pemerintahan dan pembangunan, karena masyarakat yang memiliki tingkat modal sosial yang tinggi cenderung lebih partisipatif dalam berbagai program pembangunan (E032221003, 2024: 31-32).

2.3.2 Komponen Modal Sosial

Modal sosial terdiri dari beberapa elemen utama yang membentuk dasar interaksi sosial dalam masyarakat. Menurut Fukuyama (1995), tiga komponen utama modal sosial adalah:

a. Kepercayaan (Trust)

Kepercayaan adalah elemen fundamental dalam modal sosial yang memungkinkan individu bekerja sama tanpa adanya rasa curiga yang berlebihan (Santoso, 2020: 45). Kepercayaan dapat terbentuk melalui hubungan sosial yang konsisten dan interaksi yang berkelanjutan di dalam komunitas (Wijayanti et al., 2020: 112).

Kepercayaan (trust) dalam modal sosial yang berfungsi sebagai perekat hubungan antarindividu dan kelompok dalam masyarakat. Fukuyama (1995) menegaskan bahwa kepercayaan sosial yang tinggi memungkinkan kerja sama yang lebih efektif dan mengurangi biaya transaksi dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Kepercayaan ini dapat bersifat interpersonal, seperti hubungan antaranggota komunitas, maupun institusional, yaitu kepercayaan terhadap lembaga-lembaga sosial dan pemerintahan. Kepercayaan yang kuat dalam suatu komunitas dapat mendorong terciptanya solidaritas sosial dan membantu

masyarakat mengatasi berbagai tantangan kolektif, seperti dalam kasus gotong royong atau sistem arisan yang didasarkan pada saling percaya antaranggota (Bita Nurul Angriani, 2024: 35). Kepercayaan dalam modal sosial terbagi menjadi beberapa jenis:

- 1) **Kepercayaan Interpersonal:** Kepercayaan antara individu yang terjalin melalui interaksi sosial sehari-hari. Dalam konteks pasca bencana, masyarakat yang memiliki kepercayaan tinggi antar individu lebih mudah bekerja sama dalam proses pemulihan (Zullam et al., 2020: 113).
- 2) **Kepercayaan Institusional:** Kepercayaan terhadap institusi pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan lembaga donor. Jika masyarakat percaya pada transparansi dan akuntabilitas lembaga ini, maka distribusi bantuan dan rekonstruksi pasca bencana dapat berjalan lebih efektif (Wijayanti et al., 2020: 115).
- 3) **Kepercayaan Berbasis Budaya dan Agama:** Dalam banyak komunitas, nilai-nilai budaya dan agama memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan sosial. Misalnya, di Desa Gondang pasca gempa Lombok, masyarakat memanfaatkan nilai agama sebagai dasar membangun kepercayaan dan solidaritas dalam proses pemulihan (Zullam et al., 2020: 112).

b. Norma Sosial (Social Norms).

Norma sosial yang kuat dalam masyarakat membantu menciptakan lingkungan yang stabil dan kondusif untuk kerja sama sosial (Sayuti et al., 2024: 10). Dalam konteks pasca bencana, norma sosial berperan dalam membangun kepatuhan terhadap aturan kolektif dan menciptakan stabilitas sosial yang diperlukan untuk pemulihan (Wijayanti et al., 2020: 118).

Norma sosial terbentuk dari pertukaran yang saling menguntungkan, bersifat resiprokal, dan menjamin keseimbangan dalam masyarakat. Nilai sosial, di sisi lain, mencerminkan prinsip-prinsip dasar yang dihargai dalam komunitas, seperti solidaritas, kejujuran, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai ini berperan dalam membentuk pola interaksi sosial yang harmonis dan mendorong individu untuk bertindak sesuai dengan kepentingan kolektif. Putnam (2000) menyatakan bahwa norma dan nilai yang kuat dalam suatu komunitas dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial serta memperkuat jejaring sosial yang ada (Bita Nurul Angriani, 2024: 36). Norma sosial dalam modal sosial dapat dibagi menjadi:

- 1) **Norma Solidaritas:** Norma yang mendorong individu untuk membantu sesama tanpa mengharapkan imbalan, seperti gotong royong dalam membangun kembali rumah setelah bencana (Zullam et al., 2020: 114).
- 2) **Norma Kepatuhan:** Norma yang mengatur perilaku kolektif agar masyarakat mengikuti kebijakan pemulihan pasca bencana, seperti pembagian bantuan secara adil (Wijayanti et al., 2020: 119).

- 3) **Norma Tradisional:** Nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun, seperti musyawarah desa dalam mengambil keputusan terkait rehabilitasi pasca gempa (Zullam et al., 2020: 120).

c. Jaringan Sosial (Social Networks)

Jaringan sosial memungkinkan individu dan kelompok untuk saling berbagi sumber daya, informasi, dan dukungan dalam menghadapi tantangan sosial maupun ekonomi (Santoso, 2020: 50). norma dan nilai sosial juga menjadi komponen penting dalam modal sosial. Norma merupakan seperangkat aturan yang mengatur perilaku individu dalam suatu masyarakat dan berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial. Menurut Hasbullah (2006).

Jaringan sosial merupakan aspek lain dari modal sosial yang mencerminkan hubungan antarindividu maupun kelompok dalam suatu masyarakat. Coleman (1988) menjelaskan bahwa jaringan sosial dapat memberikan akses terhadap informasi, sumber daya, dan dukungan sosial yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan jaringan sosial yang kuat memungkinkan individu untuk saling membantu dan bekerja sama dalam berbagai aktivitas, seperti kegiatan ekonomi, politik, maupun sosial. Dalam konteks tertentu, jaringan sosial juga dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya melalui sistem patron-klien dalam komunitas lokal atau jaringan bisnis yang memberikan peluang ekonomi bagi anggotanya. Namun, seperti yang diungkapkan oleh Fukuyama (1995), efektivitas jaringan sosial sangat bergantung pada tingkat kepercayaan dan norma yang mendasarinya, sehingga tanpa elemen-elemen tersebut, jaringan sosial dapat kehilangan fungsinya sebagai modal sosial yang produktif (Farhan Mutahar, 2023: 24). Jaringan sosial dalam konteks rekonstruksi pasca bencana melibatkan:

- 1) **Jaringan Internal:** Hubungan sosial dalam komunitas lokal yang memfasilitasi pertukaran bantuan dan dukungan emosional bagi korban bencana (Wijayanti et al., 2020: 122).
- 2) **Jaringan Eksternal:** Hubungan dengan organisasi non-pemerintah, relawan, dan lembaga donor yang berkontribusi dalam mendukung pemulihan infrastruktur dan ekonomi (Zullam et al., 2020: 125).
- 3) **Jaringan Profesional:** Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta dalam menciptakan strategi pemulihan yang berkelanjutan (Wijayanti et al., 2020: 126).

2.3.3. Strategi Penguatan Modal Sosial

Untuk meningkatkan modal sosial dalam masyarakat, diperlukan strategi yang melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, organisasi masyarakat sipil, maupun sektor swasta. Beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain:

1. Mendorong Partisipasi Masyarakat

Partisipasi aktif dalam organisasi sosial dan kegiatan komunitas dapat memperkuat jaringan sosial serta meningkatkan rasa kebersamaan (Sayuti et al.,

2024: 39). Kegiatan seperti gotong royong, musyawarah desa, dan pengambilan keputusan kolektif dapat memperkuat hubungan sosial antar warga dan membangun solidaritas komunitas. Partisipasi masyarakat dalam koperasi dan organisasi sosial juga membantu menciptakan mekanisme ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Wijayanti et al., 2020: 130). Selain itu, penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan pendidikan informal dapat meningkatkan keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya lokal (Santoso, 2020: 95).

Dalam konteks pembangunan sosial yang lebih luas, pendekatan berbasis komunitas menjadi strategi efektif dalam meningkatkan modal sosial. Program yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan, seperti perencanaan tata ruang desa dan distribusi sumber daya, dapat menciptakan kepemilikan bersama terhadap pembangunan sosial (Wijayanti et al., 2020: 140).

2. Membangun Kepercayaan Publik

Transparansi dalam kebijakan publik dan distribusi sumber daya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan organisasi sosial (Santoso, 2020: 90). Kepercayaan publik dapat diperkuat melalui mekanisme pengawasan bersama, keterlibatan komunitas dalam evaluasi kebijakan, serta dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat. Di banyak daerah pasca bencana, kepercayaan terhadap institusi meningkat ketika warga diberi ruang untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan implementasi program pemulihan (Zullam et al., 2020: 132).

Selain itu, strategi komunikasi yang lebih inklusif dan penggunaan teknologi digital dalam menyebarkan informasi dapat membantu membangun kredibilitas institusi. Penggunaan platform daring untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga semakin relevan dalam era digitalisasi saat ini (Sayuti et al., 2024: 55).

2.3.4 Teori Pemulihan

Pemulihan atau rekonstruksi dalam KBBI dimaknai sebagai pengembalian seperti semula. Sehingga dapat dipahami bahwa rekonstruksi merupakan sebuah pembentukan kembali atau penyusunan ulang untuk memulihkan hal yang awalnya tidak benar menjadi benar. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana mendefinisikan rekonstruksi adalah perumusan kebijakan dan usaha serta langkahlangkah nyata yang terencana baik, konsisten dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua prasarana, sarana dan sistem kelembagaan, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pasca bencana.

Rekonstruksi dalam konteks kebencanaan bertujuan untuk mengembalikan kondisi fisik maupun non-fisik baik sebagian maupun seluruhnya pada kondisi sesuai dengan fungsinya dapat berjalan dengan baik dan masyarakat dapat terlindungi lebih baik dari berbagai ancaman bencana secara jangka panjang (Wawan Rahmadi, 2022: 44). Rekonstruksi sosial ekonomi adalah proses membangun kembali struktur sosial dan ekonomi masyarakat setelah mengalami disrupsi, seperti bencana alam atau perubahan signifikan lainnya. Proses ini bertujuan untuk memulihkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai strategi yang melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak (Irdansyah: 2018).

a. Rekonstruksi Sosial Pasca Bencana Gempa Bumi

Gempa bumi tidak hanya menghancurkan infrastruktur fisik, tetapi juga memberikan dampak besar terhadap struktur sosial masyarakat yang terdampak (Saniro, Hawa and Pratama, 2024). Bencana ini sering kali menimbulkan perubahan besar dalam cara masyarakat berinteraksi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam banyak kasus, peran sosial dalam komunitas berubah, dengan munculnya peran baru yang sebelumnya tidak ada. Ketika banyak individu kehilangan rumah dan pekerjaan mereka, solidaritas dalam masyarakat pun meningkat, sering kali memunculkan kelompok baru yang saling mendukung untuk bertahan hidup. Namun, perubahan ini juga menimbulkan tantangan, seperti kesulitan dalam memulihkan pola interaksi sosial yang sudah lama ada.

Masyarakat yang tergerak untuk membantu sesama pasca bencana sering kali mengalami peningkatan solidaritas. Kerja sama dalam menghadapi tantangan dan kesulitan menjadi kunci untuk bertahan hidup, dengan banyak individu dan kelompok bekerja bersama untuk memperbaiki kehidupan mereka. Walaupun solidaritas sosial dapat memperkuat hubungan antaranggota masyarakat, bencana juga berpotensi menimbulkan ketegangan yang memicu konflik sosial. Ketidaksetaraan dalam distribusi bantuan, perebutan sumber daya yang terbatas, dan ketidakadilan dalam keputusan pembagian dapat menyebabkan perpecahan dalam masyarakat.

Di sisi lain, bencana alam juga membawa dampak besar terhadap kesehatan mental masyarakat. Gangguan psikologis seperti stres pascatrauma (PTSD) dapat dialami oleh mereka yang selamat dari bencana (Aryuni, 2023). Perasaan ketakutan, kecemasan, dan depresi menjadi gejala umum yang dialami oleh individu yang merasakan dampak langsung dari bencana tersebut. Anak-anak, orang tua, dan individu yang kehilangan orang terdekat mereka lebih rentan terhadap trauma psikososial. Dampak negatif ini tidak hanya memengaruhi individu secara pribadi, tetapi juga memengaruhi kualitas hidup mereka dalam jangka panjang.

Pemulihan dari dampak psikologis pasca bencana memerlukan pendekatan yang holistik, di mana pendampingan psikososial menjadi bagian penting dari proses pemulihan. Program-program rehabilitasi dan konseling ditujukan untuk membantu masyarakat memulihkan kesejahteraan emosional dan psikologis mereka. Selain itu, penyediaan layanan psikologis di pusat-pusat pemulihan bencana sangat membantu dalam mengurangi dampak jangka panjang terhadap kesehatan mental. Pendekatan

ini mengutamakan keterlibatan masyarakat dalam proses pemulihan dan memberikan dukungan yang dibutuhkan untuk mengatasi trauma.

Relokasi masyarakat pasca bencana juga menjadi tantangan besar dalam proses pemulihan. Banyak orang yang terpaksa meninggalkan rumah mereka dan pindah ke tempat yang lebih aman, sering kali di lokasi yang jauh dari tempat tinggal mereka sebelumnya. Relokasi ini dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti kesulitan dalam memperoleh sumber daya seperti air bersih, makanan, dan pekerjaan. Selain itu, masyarakat yang direlokasi sering kali menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan baru. Mereka mungkin kehilangan akses ke jaringan sosial yang mereka bangun selama bertahun-tahun, yang dapat memperburuk isolasi sosial dan psikologis.

Proses adaptasi terhadap lingkungan baru ini memerlukan dukungan yang memadai dari pemerintah dan lembaga sosial. Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa masyarakat yang terdampak bencana mendapat akses ke layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan yang layak (Riyanto and Kovalenko, 2023). Pembangunan infrastruktur yang cepat dan tepat guna menjadi salah satu kunci untuk mendukung adaptasi sosial masyarakat yang terdampak. Selain itu, lembaga sosial juga memainkan peran vital dalam membantu masyarakat membangun kembali jaringan sosial mereka yang hilang akibat relokasi.

Relokasi bukan hanya sekadar memindahkan masyarakat ke tempat yang lebih aman, tetapi juga mencakup upaya untuk memastikan bahwa mereka dapat melanjutkan kehidupan mereka dengan normal. Dalam beberapa kasus, masyarakat yang terpaksa pindah mungkin merasa kehilangan identitas dan rasa memiliki terhadap lingkungan baru mereka. Oleh karena itu, program-program yang memfasilitasi integrasi sosial menjadi sangat penting dalam memulihkan kesejahteraan masyarakat yang terpaksa relokasi.

Peran pemerintah dalam membantu adaptasi sosial ini tidak hanya terbatas pada penyediaan fasilitas fisik dan sumber daya. Lebih dari itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa masyarakat mendapatkan akses ke informasi yang jelas dan transparan tentang proses pemulihan dan relokasi. Komunikasi yang baik dapat mengurangi kebingungan dan kecemasan yang muncul akibat ketidakpastian dalam proses tersebut.

Selain pemerintah, lembaga sosial juga berperan penting dalam mendukung adaptasi masyarakat yang terdampak. Lembaga-lembaga ini menyediakan berbagai layanan pendampingan, seperti bantuan psikologis, pelatihan keterampilan baru, dan program pemberdayaan ekonomi. Semua upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat bangkit kembali dan menjalani kehidupan yang lebih baik meskipun berada dalam lingkungan yang baru.

Meskipun bencana alam seperti gempa bumi memberikan dampak sosial yang besar, proses pemulihan juga membuka peluang untuk menciptakan komunitas yang lebih kuat dan lebih solidaritas. Banyak orang yang sebelumnya tidak memiliki hubungan dekat dengan tetangga atau masyarakat sekitarnya, kini terlibat aktif

dalam usaha pemulihan dan saling membantu (Sayuti *et al.*, 2024). Hal ini bisa menjadi awal dari perubahan sosial yang lebih positif dalam jangka panjang.

Namun, meskipun solidaritas sosial meningkat, ada juga dampak negatif yang muncul, seperti ketidakadilan dalam distribusi bantuan yang dapat memperburuk ketegangan sosial. Dalam beberapa kasus, distribusi yang tidak merata dapat menyebabkan ketidakpuasan dan konflik antaranggota masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pemulihan untuk memastikan bahwa proses distribusi bantuan dilakukan secara adil dan transparan.

Selain itu, banyak orang yang kehilangan mata pencaharian mereka setelah bencana, yang mengarah pada peningkatan kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi di daerah terdampak. Hal ini menambah tekanan pada upaya pemulihan, karena masyarakat harus menghadapi tantangan ekonomi yang berat, di samping masalah psikologis dan sosial. Oleh karena itu, pemulihan ekonomi menjadi bagian integral dari proses pemulihan pasca bencana.

Salah satu cara untuk mendukung pemulihan ekonomi adalah dengan memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat terdampak. Pelatihan ini dapat membantu mereka memperoleh keterampilan baru yang relevan dengan pasar kerja pasca bencana. Selain itu, pemberdayaan ekonomi melalui bantuan usaha kecil juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam pemulihan.

Selain masalah sosial dan ekonomi, bencana alam juga memengaruhi dinamika politik di daerah terdampak. Pemulihan pasca bencana sering kali menjadi ajang bagi pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk menunjukkan keberhasilan mereka dalam menangani dampak bencana (Hendra, Setiawan and Handayani, 2024). Ketegangan politik dapat muncul jika ada ketidakpuasan terhadap cara pemulihan dilaksanakan atau jika ada ketidakjelasan dalam kebijakan yang diterapkan.

Penting bagi pemerintah untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk organisasi non-pemerintah (NGO) dan masyarakat setempat, dalam proses pemulihan. Kerjasama ini dapat mengurangi potensi ketegangan dan menciptakan solusi yang lebih efektif dan tepat sasaran. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pemulihan dapat terlaksana dengan baik, agar mereka merasa memiliki peran dalam memulihkan kehidupan mereka.

Bencana seperti gempa bumi bukan hanya mengubah struktur sosial masyarakat dalam jangka pendek, tetapi juga mempengaruhi hubungan antarindividu dalam jangka panjang (Khoiriah and Sos, 2021). Banyak individu yang merasakan kedekatan dan kekuatan dalam solidaritas yang terbentuk pasca bencana, sementara sebagian lainnya mungkin merasa terasingkan akibat perbedaan dalam penanganan bencana atau akses terhadap sumber daya.

Pada akhirnya, meskipun dampak sosial pasca gempa bumi dapat menyebabkan berbagai tantangan, proses pemulihan yang melibatkan dukungan sosial dan ekonomi dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk membangun kembali kehidupan mereka dengan lebih kuat dan lebih solid. Dengan

dukungan yang tepat, masyarakat yang terdampak bencana dapat mengatasi trauma psikologis dan kesulitan sosial, serta berkembang dalam kehidupan yang lebih baik.

b. Rekonstruksi Ekonomi Pasca Bencana Gempa Bumi

Gempa bumi tidak hanya menghancurkan struktur fisik masyarakat, tetapi juga berdampak pada perekonomian yang bergantung pada sektor-sektor tertentu (Purwadinata and Ridolof, 2024). Sektor pertanian, perikanan, dan industri kecil sering kali menjadi yang paling terdampak, karena bencana tersebut merusak lahan pertanian, infrastruktur perikanan, dan fasilitas produksi. Hal ini menyebabkan banyak pekerja kehilangan pekerjaan mereka, yang pada gilirannya memperburuk ketidakstabilan ekonomi. Masyarakat yang kehilangan mata pencaharian utama mereka harus mencari cara untuk bertahan hidup, dan ini mendorong munculnya strategi lokal yang beragam untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang timbul akibat bencana.

Upaya masyarakat untuk mempertahankan ekonomi mereka sering kali melibatkan diversifikasi mata pencaharian. Banyak individu atau keluarga yang sebelumnya bergantung pada satu sumber pendapatan kini mulai mengembangkan usaha kecil-kecilan atau mencari pekerjaan tambahan di sektor lain (Kasim *et al.*, 2025). Meskipun ini dapat membantu mengurangi dampak langsung kehilangan pekerjaan, proses adaptasi ini memerlukan waktu dan sumber daya yang tidak selalu tersedia. Selain itu, keberhasilan usaha-usaha kecil tersebut bergantung pada ketersediaan bahan baku, pasar yang stabil, dan kemampuan masyarakat untuk mengakses modal yang dibutuhkan.

Kerusakan infrastruktur juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Infrastruktur yang rusak, seperti jalan, jembatan, pasar, dan fasilitas produksi, menghambat jalannya aktivitas ekonomi di daerah terdampak. Pasar yang rusak menyebabkan kesulitan dalam distribusi barang, dan transportasi yang terganggu memperlambat pergerakan barang dan jasa. Ini mengarah pada penurunan produksi dan pendapatan di tingkat individu dan masyarakat. Di sisi lain, kerusakan infrastruktur juga menghambat upaya pemulihan ekonomi, karena sulit untuk menghubungkan daerah terdampak dengan pasar yang lebih luas atau dengan pusat-pusat produksi yang tidak terkena dampak.

Pemerintah memiliki peran penting dalam mempercepat pemulihan ekonomi dengan fokus pada rekonstruksi infrastruktur. Upaya ini melibatkan alokasi anggaran khusus untuk membangun kembali jalan, jembatan, dan fasilitas lainnya yang rusak akibat bencana. Program rekonstruksi ini tidak hanya bertujuan untuk memulihkan infrastruktur fisik, tetapi juga untuk menghidupkan kembali kegiatan ekonomi yang bergantung pada infrastruktur tersebut. Pemerintah juga sering bekerja sama dengan lembaga internasional dan organisasi non-pemerintah (NGO) untuk mendapatkan dana dan dukungan teknis yang diperlukan dalam proses ini.

Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab dalam menyediakan dukungan finansial kepada masyarakat terdampak untuk membantu mereka memulai kembali usaha mereka (Novianty, Dewi and Anwar, 2024). Dalam beberapa kasus,

pemerintah memberikan bantuan langsung berupa uang atau barang, sementara dalam kasus lain, mereka menawarkan kredit murah atau pinjaman kepada pelaku usaha kecil untuk mempercepat proses pemulihan. Program-program ini penting untuk memberikan lapangan pekerjaan baru dan menciptakan peluang ekonomi yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah terdampak.

Resiliensi ekonomi komunitas adalah faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pemulihan ekonomi pasca bencana. Faktor-faktor seperti akses ke kredit, dukungan internasional, dan ketersediaan sumber daya lokal sangat penting untuk mendukung resiliensi ekonomi masyarakat. Akses ke kredit memungkinkan masyarakat untuk memulai usaha baru atau memperbaiki usaha yang sudah ada. Bantuan internasional, baik dalam bentuk dana atau bantuan teknis, juga dapat mempercepat proses pemulihan, terutama di daerah yang memiliki sumber daya terbatas.

Ketersediaan sumber daya lokal, seperti bahan baku untuk usaha kecil dan keterampilan yang dimiliki masyarakat, juga memainkan peran penting dalam meningkatkan resiliensi ekonomi. Masyarakat yang memiliki keterampilan dalam kerajinan tangan, pertanian, atau industri lokal dapat lebih cepat bangkit setelah bencana karena mereka dapat memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar mereka. Hal ini juga mengurangi ketergantungan pada sumber daya eksternal, yang mungkin sulit diakses dalam situasi bencana.

Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan NGO juga menjadi faktor penentu dalam pemulihan ekonomi pasca bencana. Pemulihan yang berhasil tidak hanya mengandalkan upaya pemerintah atau NGO, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif dari masyarakat yang terdampak. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan lokal dan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. NGO, di sisi lain, dapat menyediakan bantuan teknis dan sumber daya yang dibutuhkan, serta mendukung inisiatif lokal dalam memulihkan perekonomian.

Kerjasama ini menciptakan sinergi yang memungkinkan pemulihan ekonomi berlangsung lebih cepat dan lebih berkelanjutan. Pemerintah dan NGO dapat membantu masyarakat mengakses sumber daya dan pasar yang sebelumnya sulit dijangkau, sementara masyarakat dapat memberikan wawasan lokal yang sangat berharga dalam merancang strategi pemulihan (JayantiErna, Hajar and Rinayuhani, 2024). Kolaborasi yang efektif ini juga memungkinkan pengidentifikasian potensi risiko ekonomi yang mungkin terjadi, sehingga langkah-langkah pencegahan dapat diambil lebih awal.

Pada tingkat individu, resiliensi ekonomi sangat bergantung pada kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi akibat bencana. Masyarakat yang memiliki keterampilan yang lebih beragam dan sumber daya yang lebih banyak cenderung lebih mampu bertahan dalam menghadapi kesulitan ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk dilibatkan dalam program pelatihan keterampilan dan pengembangan kapasitas yang dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan ekonomi.

Penting juga untuk memperhatikan bahwa pemulihan ekonomi bukan hanya tentang membangun kembali ekonomi yang rusak, tetapi juga tentang menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan tahan terhadap bencana di masa depan. Oleh karena itu, pemulihan ekonomi pasca bencana harus melibatkan upaya untuk meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat secara keseluruhan, dengan fokus pada keberlanjutan dan diversifikasi ekonomi. Hal ini akan membantu masyarakat lebih siap menghadapi bencana di masa yang akan datang dan mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor ekonomi yang rentan terhadap bencana.

Selain itu, sektor ekonomi yang terdiversifikasi memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dalam jangka panjang. Misalnya, jika sektor pertanian terdampak parah akibat bencana, sektor lain seperti pariwisata atau industri kreatif dapat menjadi sumber pendapatan alternatif. Oleh karena itu, penting untuk mendorong keberagaman dalam ekonomi lokal agar tidak bergantung pada satu sektor ekonomi yang rentan.

Keberhasilan pemulihan ekonomi pasca bencana juga sangat bergantung pada peran sektor swasta. Perusahaan besar yang memiliki sumber daya dan kapasitas dapat berkontribusi dalam pemulihan ekonomi dengan menyediakan bantuan langsung, membangun kembali infrastruktur, atau bahkan membuka peluang kerja bagi masyarakat terdampak. Namun, sektor swasta juga harus bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwa upaya pemulihan ekonomi tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga memberikan manfaat bagi seluruh komunitas.

Gempa bumi sering kali memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi, terutama di daerah yang sudah memiliki tingkat kemiskinan tinggi (Desinta and Sitorus, 2021). Dalam konteks ini, penting bagi kebijakan pemulihan ekonomi untuk mengatasi ketidaksetaraan ini dengan memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan masyarakat miskin. Kebijakan ini harus mencakup akses yang lebih baik ke pendidikan, pelatihan keterampilan, dan layanan sosial yang mendukung keberlanjutan ekonomi mereka.

Selain itu, pemulihan ekonomi pasca bencana juga memerlukan perhatian terhadap faktor-faktor yang dapat memengaruhi daya tarik investasi di daerah yang terdampak. Pemulihan infrastruktur yang cepat dan efisien dapat meningkatkan daya tarik ekonomi dan menarik kembali investor, yang dapat memberikan kontribusi besar dalam pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, upaya untuk memperbaiki iklim investasi dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk bisnis sangat penting dalam tahap pemulihan ekonomi.

Gempa bumi juga memberi pelajaran berharga tentang pentingnya perencanaan ekonomi yang lebih baik untuk menghadapi bencana di masa depan (Ali, Wardhani and Hidayatullah, 2023). Pemerintah dan masyarakat perlu merancang strategi jangka panjang yang tidak hanya fokus pada pemulihan jangka pendek, tetapi juga mengintegrasikan kebijakan ekonomi yang dapat membantu mencegah dampak buruk bencana yang sama di masa yang akan datang. Perencanaan ini harus mencakup pembangunan infrastruktur yang lebih tangguh,

pengelolaan sumber daya yang lebih baik, dan kebijakan yang mendukung ketahanan ekonomi jangka panjang.

2.3.5 Strategi Pemulihan Sosial Ekonomi Pasca Bencana

Pemulihan pasca bencana gempa bumi membutuhkan pendekatan yang holistik dan melibatkan berbagai lapisan dalam masyarakat, termasuk individu, kelompok, dan organisasi (Yunus *et al.*, 2024). Pendekatan ini penting dalam membangun kembali hubungan sosial yang rusak akibat bencana, serta memastikan bahwa pemulihan ekonomi dapat berlangsung dengan cara yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu langkah utama dalam pemulihan sosial adalah membangun kembali kepercayaan antar anggota komunitas yang mungkin telah terkikis oleh trauma bencana. Kepercayaan ini penting untuk menciptakan solidaritas dalam menghadapi tantangan pemulihan, di mana setiap individu merasa dihargai dan diperhatikan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pendekatan berbasis komunitas menjadi sangat penting. Mengajak masyarakat untuk aktif dalam proses pemulihan sosial memberi mereka rasa kepemilikan dan tanggung jawab atas upaya pemulihan tersebut. Melalui partisipasi aktif, masyarakat dapat berbagi pengalaman dan perasaan mereka, yang tidak hanya membantu mereka pulih secara emosional, tetapi juga menciptakan ruang untuk solidaritas. Proses ini juga membantu memperkuat jaringan sosial yang mungkin terputus oleh bencana, dengan membangun kembali hubungan interpersonal yang vital bagi ketahanan sosial.

Selain itu, program-program pemulihan yang berbasis masyarakat memungkinkan penyesuaian yang lebih tepat dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Dalam banyak kasus, masyarakat memiliki pengetahuan dan wawasan yang lebih baik tentang tantangan yang mereka hadapi serta sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, desain program pemulihan sosial yang mengutamakan partisipasi masyarakat lokal dapat meningkatkan relevansi dan efektivitas pemulihan tersebut. Program ini sering kali mencakup kegiatan yang mendorong penguatan jejaring sosial, seperti forum diskusi, kegiatan bersama, atau kerja bakti untuk membangun kembali fasilitas umum yang penting bagi kesejahteraan bersama.

Dalam pemulihan ekonomi pasca bencana, salah satu hal yang paling mendesak adalah penyediaan bantuan finansial untuk mendukung kebutuhan dasar dan pemulihan infrastruktur yang rusak (Panma *et al.*, 2024). Bantuan ini sering kali datang dalam bentuk hibah atau pinjaman lunak dari pemerintah atau lembaga donor internasional. Bantuan finansial ini penting untuk memberi fondasi awal dalam mengembalikan stabilitas ekonomi di tingkat komunitas. Tanpa bantuan ini, banyak masyarakat yang akan kesulitan memulai kembali usaha atau mengakses layanan dasar yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari.

Selain bantuan langsung, penting untuk mendorong inovasi lokal dalam menciptakan peluang ekonomi baru. Inovasi ini sering kali muncul dari kebutuhan mendesak yang dirasakan masyarakat untuk bertahan hidup dan pulih setelah bencana. Misalnya, usaha kecil yang berbasis pada sumber daya lokal dapat berkembang menjadi salah satu pilar ekonomi yang lebih tahan terhadap bencana berikutnya. Dengan memanfaatkan sumber daya alam atau keterampilan tradisional,

masyarakat dapat menciptakan produk atau layanan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga berpotensi untuk diperluas ke pasar yang lebih besar.

Pembangunan usaha lokal ini memerlukan dukungan yang lebih lanjut, seperti akses ke modal, pelatihan keterampilan, serta bantuan teknis. Beberapa daerah mungkin memiliki potensi untuk berkembang di sektor tertentu, seperti pariwisata, kerajinan tangan, atau agribisnis, yang dapat dijadikan landasan untuk pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar dan kondisi pasca bencana. Upaya ini akan membantu masyarakat untuk beradaptasi dengan cepat dan mengurangi ketergantungan pada bantuan luar yang tidak berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pemulihan merupakan hal yang tidak kalah penting. Dengan melibatkan masyarakat sejak awal, pemulihan yang direncanakan akan lebih mudah diterima dan dilaksanakan. Masyarakat yang terlibat dalam perencanaan merasa dihargai dan memiliki tanggung jawab untuk memastikan keberhasilan implementasi program tersebut. Selain itu, partisipasi masyarakat juga memastikan bahwa program pemulihan relevan dengan realitas lokal dan kebutuhan yang mendalam. Ini adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa pemulihan tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat.

Peran masyarakat dalam perencanaan juga membuka ruang untuk diskusi dan evaluasi bersama mengenai prioritas dan alokasi sumber daya (Nurza, 2024). Dalam banyak kasus, pemulihan pasca bencana melibatkan keputusan-keputusan yang harus mengutamakan kebutuhan mendesak, seperti akses terhadap pangan, air bersih, dan tempat tinggal. Masyarakat yang terlibat dalam perencanaan ini dapat memberikan wawasan yang lebih tajam tentang kebutuhan lokal yang mungkin tidak sepenuhnya dipahami oleh pihak eksternal atau pemerintah. Oleh karena itu, dialog yang konstruktif antara masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya menjadi sangat penting dalam menentukan langkah-langkah yang harus diambil.

Selanjutnya, pemberdayaan masyarakat juga sangat penting untuk memastikan keberlanjutan pemulihan. Pelatihan keterampilan dan akses ke modal menjadi hal yang mendasar agar masyarakat dapat mandiri dalam membangun ekonomi mereka setelah bencana. Program pelatihan ini bisa mencakup keterampilan teknis, seperti pertanian atau kerajinan tangan, atau keterampilan manajerial yang dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam menjalankan usaha. Dalam banyak kasus, keterampilan yang diberikan dapat membantu mereka menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi ketergantungan pada bantuan luar.

Selain itu, akses ke modal sering kali menjadi kendala besar dalam pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, program-program yang memberikan akses mudah ke pinjaman mikro atau dana hibah kecil sangat penting untuk membantu masyarakat memulai usaha mereka kembali. Pembentukan koperasi atau kelompok usaha bersama juga menjadi salah satu cara untuk meningkatkan daya beli dan akses ke modal bagi masyarakat yang tidak memiliki sumber daya sendiri (Widodo, Asyabudin and Alfi, 2023).

Pemberdayaan lokal juga dapat menciptakan rasa kebanggaan dan kemandirian dalam masyarakat. Ketika masyarakat diberdayakan untuk mengelola proses pemulihan mereka sendiri, mereka merasa lebih terlibat dan bertanggung jawab atas masa depan komunitas mereka. Hal ini juga membangun rasa kepercayaan diri yang dapat mempercepat proses pemulihan psikologis. Masyarakat yang merasa diberdayakan cenderung lebih optimis dan lebih siap untuk menghadapi tantangan yang ada.

Keberlanjutan pemulihan pasca bencana sangat bergantung pada pendekatan yang berbasis pada ketahanan lokal dan kapasitas masyarakat. Sebuah komunitas yang memiliki kapasitas untuk merencanakan, melaksanakan, dan memelihara program pemulihan mereka sendiri akan lebih tahan terhadap dampak bencana berikutnya. Oleh karena itu, pemulihan pasca bencana tidak hanya fokus pada pengembalian kondisi semula, tetapi juga mencakup pembangunan kapasitas yang memungkinkan masyarakat untuk tumbuh lebih kuat dan lebih mandiri di masa depan.

Penting untuk memahami bahwa pemulihan sosial dan ekonomi tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Proses ini memerlukan waktu dan kolaborasi dari berbagai pihak. Masyarakat, pemerintah, NGO, dan sektor swasta harus bekerja bersama untuk menciptakan strategi yang menguntungkan semua pihak dan memastikan bahwa pemulihan berlangsung dengan cara yang inklusif dan berkelanjutan (Purnomo *et al.*, 2024). Melalui pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, pemulihan pasca bencana dapat membuka peluang baru bagi masyarakat untuk berkembang lebih baik dan lebih tangguh di masa yang akan datang.

Namun, untuk mencapai pemulihan yang berkelanjutan, perhatian juga harus diberikan pada faktor-faktor eksternal yang dapat memengaruhi keberhasilan pemulihan, seperti perubahan iklim dan kebijakan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemulihan pasca bencana harus dilakukan dengan perspektif jangka panjang yang mempertimbangkan tantangan-tantangan global dan lokal. Hal ini memastikan bahwa komunitas tidak hanya pulih dari bencana, tetapi juga dipersiapkan untuk menghadapi risiko di masa depan dengan lebih baik.

2.4 Lokasi Penelitian

Dusun Aholeang merupakan salah satu wilayah administratif yang berada di Desa Mekatta, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Wilayah ini terletak di bagian barat Pulau Sulawesi dan berada di kawasan yang tergolong rawan bencana, terutama gempa bumi dan longsor. Secara geografis, Dusun Aholeang berada di daerah perbukitan dengan topografi yang cukup terjal, yang turut berpengaruh terhadap kerentanan wilayah ini terhadap dampak bencana alam, khususnya gempa bumi yang terjadi pada 15 Januari 2021 lalu.

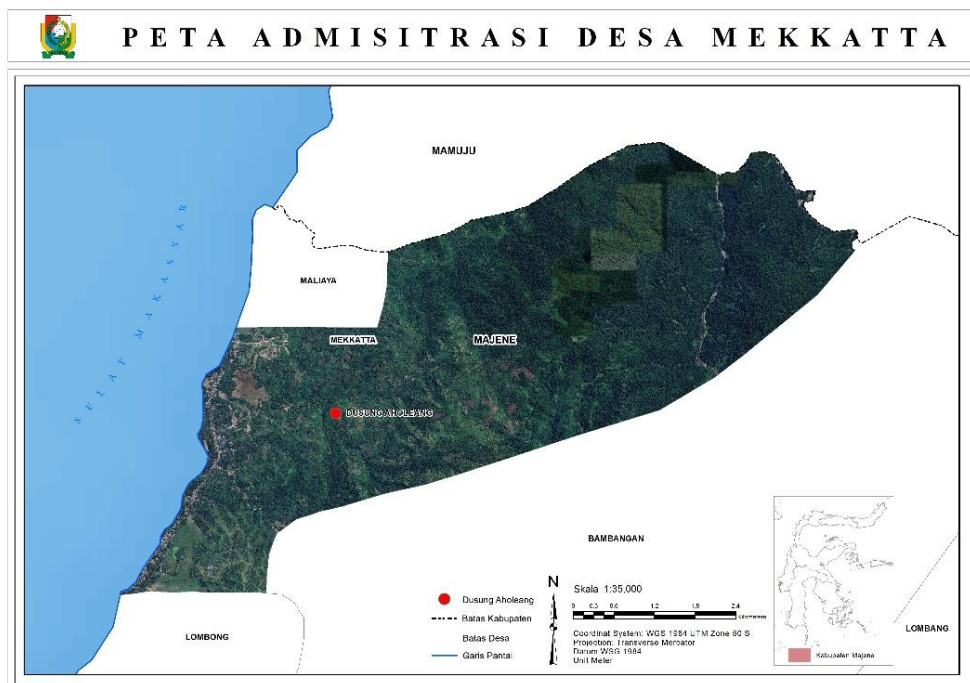
Dusun Aholeang menjadi sangat dikenal pasca bencana gempa bumi berkekuatan 6,2 magnitudo yang mengguncang wilayah Majene dan Mamuju. Salah satu dampak paling parah dari gempa tersebut adalah longsor besar yang menimbun hampir seluruh permukiman warga di Dusun Aholeang. Akibatnya, hampir seluruh warga dusun kehilangan tempat tinggal, harta benda, serta mengalami disrupsi sosial dan ekonomi yang cukup besar. Banyak korban jiwa berjatuh, dan sebagian besar penyintas kemudian harus direlokasi ke lokasi pengungsian atau tempat tinggal sementara. Hal ini menjadikan Aholeang sebagai simbol nyata dari kerentanan sosial dan ekologis masyarakat pesisir barat Sulawesi terhadap bencana alam.

Secara demografis, masyarakat Dusun Aholeang didominasi oleh kelompok etnis Mandar yang secara budaya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai solidaritas, gotong royong, dan ikatan kekerabatan. Nilai-nilai ini membentuk modal sosial yang kuat di kalangan masyarakat. Struktur sosial yang terbangun selama bertahun-tahun, seperti keberadaan tokoh adat, tokoh agama, dan mekanisme informal dalam menyelesaikan masalah komunitas, memainkan peran penting dalam proses penyesuaian dan pemulihan pasca bencana. Modal sosial ini kemudian menjadi fondasi utama dalam upaya warga Aholeang untuk membangun kembali kehidupan mereka, meskipun berada dalam kondisi yang sangat terbatas.

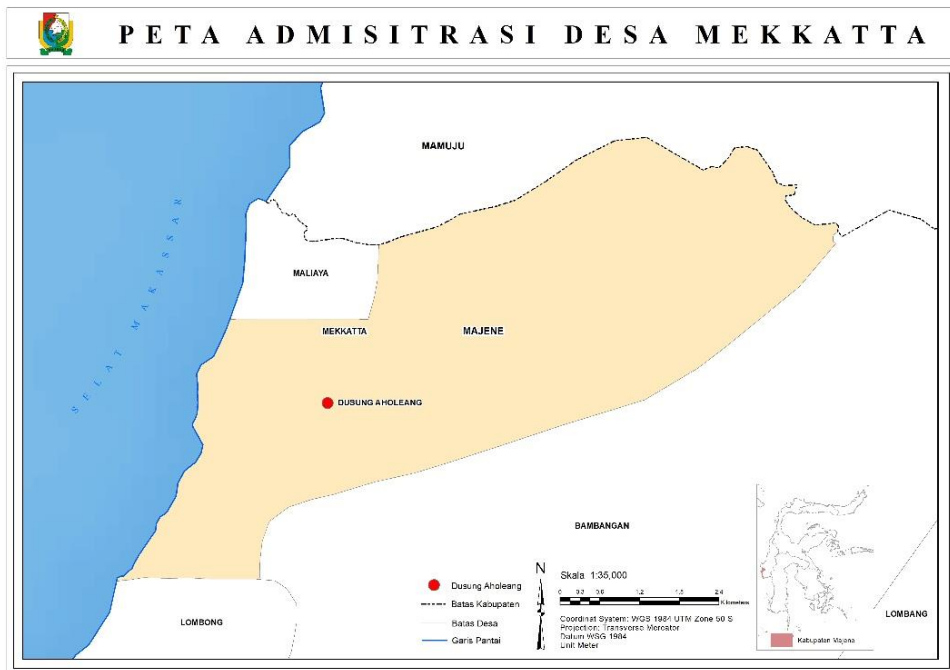
Kecamatan Malunda sendiri merupakan salah satu kecamatan pesisir yang terletak di bagian utara Kabupaten Majene. Wilayah ini memiliki karakteristik rural dan mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian, perkebunan, serta sebagian kecil di sektor jasa informal dan perdagangan kecil-kecilan. Infrastruktur dasar seperti jalan, akses air bersih, pendidikan, dan layanan kesehatan tergolong terbatas. Kondisi infrastruktur yang minim ini turut mempersulit proses tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana di wilayah ini, termasuk di Dusun Aholeang.

Pemilihan Dusun Aholeang sebagai lokasi penelitian memiliki signifikansi penting dalam konteks studi tentang pemulihan pasca bencana berbasis modal sosial. Keunikan komunitas ini terletak pada kuatnya kohesi sosial yang ditunjukkan oleh warga dalam menghadapi situasi krisis, sekaligus tantangan berat yang mereka hadapi akibat hilangnya tempat tinggal dan sumber mata pencaharian. Dengan kondisi demikian, Dusun Aholeang memberikan konteks empirik yang kaya untuk menggali bagaimana modal sosial – seperti jaringan sosial, kepercayaan antarindividu, dan norma kolektif – dapat berfungsi dalam mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat pasca bencana. Selain itu, lokasi ini juga merepresentasikan realitas komunitas pedesaan di Indonesia yang kerap kali berada dalam posisi rentan terhadap bencana namun juga memiliki potensi kekuatan lokal yang besar. Oleh karena itu, hasil penelitian di Dusun Aholeang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap pengembangan kebijakan pemulihan bencana berbasis komunitas dan pembangunan sosial yang berkelanjutan di wilayah-wilayah serupa.

Selain sebagai lokasi yang mencerminkan dampak langsung dari bencana alam besar, Dusun Aholeang juga menjadi contoh nyata bagaimana masyarakat lokal mengembangkan mekanisme adaptasi sosial yang berbasis nilai budaya. Setelah bencana, komunitas Aholeang menunjukkan resiliensi dengan membentuk kelompok-kelompok relawan internal, memperkuat hubungan antarkeluarga, serta berpartisipasi aktif dalam diskusi komunitas mengenai relokasi dan pemulihan. Upaya ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya bergantung pada bantuan eksternal, tetapi juga memobilisasi sumber daya sosial yang ada di dalam komunitas mereka. Keberadaan tokoh masyarakat, pemuda, dan pemimpin agama berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pihak luar, termasuk pemerintah dan organisasi kemanusiaan. Praktik-praktik ini memperlihatkan bagaimana kearifan lokal dan kekuatan komunitas dapat dijadikan aset dalam proses manajemen risiko bencana dan perencanaan pembangunan kembali. Oleh karena itu, Dusun Aholeang layak dijadikan locus studi strategis dalam memahami dinamika modal sosial dalam konteks pemulihan pasca bencana di wilayah pedesaan Indonesia. Gambar 2.1. dan 2.2. memperlihatkan peta administrasi dan peta citra satelit lokasi penelitian.



Gambar 2.1. Peta administrasi lokasi penelitian



Gambar 2.2. Peta citra satelit lokasi penelitian

2.5 Kerangka Konseptual Penelitian

1. Latar Belakang Konseptual

Pemulihan pascabencana tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan bantuan material dan kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh kekuatan sosial masyarakat itu sendiri. Salah satu kekuatan tersebut adalah modal sosial, yang mencakup jaringan sosial, norma sosial, dan kepercayaan antarwarga (Putnam, 1993). Modal sosial memiliki peran penting dalam mempercepat proses pemulihan sosial dan ekonomi, terutama dalam masyarakat yang memiliki struktur sosial kekerabatan yang kuat seperti di Dusun Aholeang.

2. Konsep Utama Penelitian

a. Modal Sosial

1. *Jaringan Sosial (social networks)*: Interaksi antara individu dan kelompok dalam komunitas, baik formal maupun informal.
2. *Norma Sosial (social norms)*: Aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku kolektif dan mendorong solidaritas.
3. *Kepercayaan (trust)*: Tingkat kepercayaan antaranggota masyarakat dan terhadap institusi sosial atau pemerintah.

b. Pemulihan Sosial

1. Reintegrasi sosial masyarakat yang terdampak bencana

2. Pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat relokasi dan trauma
- c. **Pemulihan Ekonomi**
 1. Pemulihan mata pencaharian masyarakat (pertanian, perdagangan, dan usaha kecil)
 2. Upaya kolektif dalam mengembangkan kembali kegiatan ekonomi lokal
3. Hubungan Antarvariabel

Penelitian ini mengasumsikan bahwa:

- a. Modal sosial memiliki pengaruh langsung terhadap pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat pascabencana.
 - b. Semakin kuat jaringan sosial, norma kolektif, dan kepercayaan masyarakat, semakin cepat dan berkelanjutan proses pemulihan terjadi.
 - c. Modal sosial dapat berfungsi sebagai mekanisme substitusi ketika bantuan material atau dukungan pemerintah terbatas.
4. Konteks Lokal: Aholeang

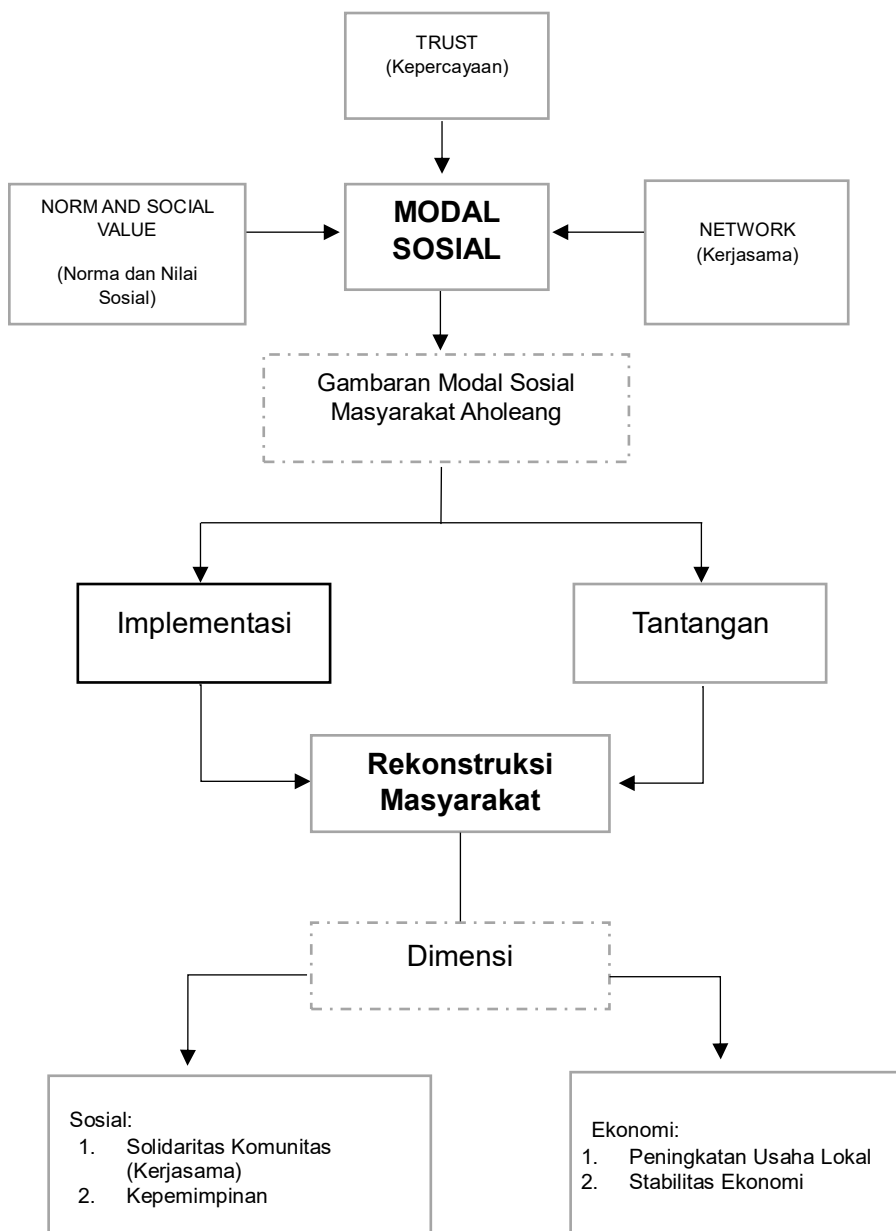
Dusun Aholeang memiliki karakteristik komunitas yang masih memegang teguh nilai-nilai kekerabatan, gotong royong, dan kearifan lokal. Struktur sosial tradisional yang ada menjadi konteks penting dalam memahami bagaimana modal sosial bekerja dalam mendukung pemulihan.

5. Tujuan Konseptual

Modal sosial memainkan peranan penting dalam mempercepat proses pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat pasca bencana, seperti yang terjadi di Aholeang. Elemen-elemen seperti kepercayaan (trust), norma sosial, jaringan (network), dan gotong royong menjadi kekuatan utama dalam membangun solidaritas dan kolaborasi antarwarga. Melalui jaringan sosial yang kuat, masyarakat dapat saling membantu dalam menyediakan kebutuhan dasar, berbagi informasi, serta mengorganisir kegiatan kolektif seperti perbaikan rumah dan fasilitas umum. Kepercayaan antarkomunitas juga meningkatkan efektivitas distribusi bantuan, karena masyarakat lebih menerima dan mendukung proses yang dilakukan secara lokal dan partisipatif. Dengan demikian, modal sosial tidak hanya menjadi perekat sosial, tetapi juga alat strategis dalam mengatasi keterbatasan sumber daya formal pasca gempa.

Namun, dalam proses mobilisasi modal sosial, terdapat berbagai faktor yang dapat menjadi penguat maupun penghambat. Faktor penguat antara lain adalah adanya kepemimpinan lokal yang inklusif, struktur komunitas yang kohesif, serta warisan budaya yang menjunjung tinggi nilai tolong-menolong. Sebaliknya, fragmentasi sosial akibat konflik internal, kurangnya koordinasi dengan pihak luar, serta ketimpangan akses terhadap informasi dan sumber daya dapat menjadi hambatan serius dalam penguatan modal sosial. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dinamika ini secara mendalam agar strategi pemulihan yang berbasis komunitas dapat dirancang secara lebih adaptif dan berkelanjutan.

Kerangka konseptual pada Gambar 2.3. mengilustrasikan hubungan antar elemen modal sosial tersebut dan bagaimana pengaruhnya terhadap pemulihan sosial ekonomi masyarakat Aholeang.



Gambar 2.3. Kerangka konseptual penelitian

2.6 Bagan Alir Penelitian

Bagan alir penelitian merupakan representasi visual dari tahapan yang dilakukan dalam suatu penelitian, bertujuan untuk memastikan proses penelitian berlangsung secara sistematis dan terarah (Creswell, 2014). Menurut Sugiyono (2017), bagan alir penelitian dapat membantu dalam memahami hubungan antara setiap tahap penelitian serta alur kerja yang harus diikuti untuk mencapai hasil yang valid dan dapat diandalkan. Dalam penelitian ini, bagan alir disusun berdasarkan tahapan yang umum digunakan dalam penelitian ilmiah, dimulai dari identifikasi masalah hingga penyusunan kesimpulan dan rekomendasi. Setiap tahap memiliki fungsi dan tujuan spesifik yang berkontribusi terhadap kejelasan dan ketepatan hasil penelitian.

Penelitian ini diawali dengan tahap identifikasi masalah dan perumusan tujuan penelitian, yang berfokus pada pentingnya pemahaman mengenai dinamika dan tantangan modal sosial masyarakat Aholeang pasca bencana gempa bumi. Setelah itu, dilakukan kajian literatur dan studi empirik untuk meninjau berbagai teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, terutama mengenai modal sosial dalam konteks pemulihan bencana.

Langkah selanjutnya adalah perumusan kerangka konseptual yang menjadi dasar teoritis dalam mengkaji modal sosial di masyarakat Aholeang. Berdasarkan kerangka ini, dilakukan penentuan lokasi dan metodologi penelitian, yang mencakup pendekatan kualitatif dan metode pengumpulan data melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, serta dokumentasi.

Kemudian dilakukan pengumpulan data lapangan, yang bertujuan menggali informasi mendalam mengenai karakteristik modal sosial masyarakat, perubahan struktur sosial pasca gempa, serta upaya kolektif yang dilakukan dalam proses pemulihan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis untuk mengidentifikasi dinamika dan karakteristik modal sosial, seperti pola gotong royong, kepercayaan antarkelompok, serta keberadaan pranata sosial lokal.

Setelah itu, fokus analisis diarahkan pada tantangan yang dihadapi masyarakat dalam mempertahankan modal sosial, seperti pergeseran nilai, relokasi, dan ketergantungan terhadap bantuan eksternal. Hasil dari kedua tahap analisis ini kemudian disintesis dan diinterpretasikan untuk mendapatkan pemahaman komprehensif mengenai peran dan hambatan modal sosial dalam pemulihan sosial-ekonomi masyarakat Aholeang.

Akhirnya, penelitian ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap strategi pemulihan berbasis komunitas yang lebih efektif dan berkelanjutan, serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi bencana di masa depan.

2.7 Sumber Data

Sumber data penelitian ini didasarkan pada data primer dan data sekunder, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah informasi atau keterangan yang diperoleh langsung dari narasumber atau informan yang berkaitan dengan topik penelitian. Informan yang dimaksud adalah masyarakat yang bertani, tokoh masyarakat, tim kelompok siaga bencana yang ada di dusun tersebut. Data yang diperoleh dari informan tersebut berupa keterangan kata-kata, ucapan, dan perilaku para informan yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan. Data-data itu tentunya berhubungan dengan pokok dan fokus penelitian, sehingga data yang diperoleh dapat menjawab pertanyaan penelitian secara utuh melalui pengumpulan data primer tersebut. Penelitian ini terdiri dari beberapa kelompok kunci yang dianggap mampu memberikan data primer dan perspektif beragam mengenai dampak bencana dan upaya pemulihan di Dusun Aholeang:

a. Kepala Keluarga yang Terdampak Langsung oleh Bencana

Kepala keluarga menjadi informan utama karena mereka secara langsung merasakan dampak bencana terhadap kehidupan sehari-hari, termasuk kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, dan anggota keluarga. Melalui wawancara mendalam, peneliti akan menggali pengalaman mereka, strategi bertahan hidup, serta harapan mereka untuk masa depan.

b. Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat, termasuk pemimpin adat, pemuka agama, dan ketua RT/RW, dipilih sebagai subjek penelitian karena peran mereka yang signifikan dalam menjaga kohesi sosial, mengorganisasi bantuan, dan membimbing masyarakat selama masa pemulihan. Wawancara dengan tokoh-tokoh ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana masyarakat lokal mengatasi trauma kolektif dan membangun kembali komunitas mereka dengan mempertahankan nilai-nilai budaya dan agama yang ada.

c. Aparat Desa

Aparat desa, seperti kepala desa dan perangkat desa lainnya, dilibatkan untuk memahami peran pemerintah lokal dalam koordinasi bantuan dan pengelolaan sumber daya selama dan setelah bencana. Fokusnya adalah pada tantangan administratif dan logistik yang mereka hadapi serta keberhasilan yang dicapai dalam memulihkan kondisi desa.

d. Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi kemasyarakatan yang aktif dalam upaya tanggap darurat dan pemulihan bencana memiliki perspektif penting tentang intervensi yang dilakukan untuk mendukung masyarakat terdampak. Peneliti akan menggali

informasi terkait jenis bantuan yang diberikan, efektivitas program pemulihan, dan hambatan yang mereka alami dalam menjalankan misi kemanusiaan di Dusun Aholeang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumen tertulis maupun rekaman video, yang bersumber koran, buku, jurnal, website, platform youtube dan sumber lainnya yang berfungsi untuk menunjang data terkait topik penelitian. Semua data dokumen tertulis tersebut ditelusuri dan dikumpulkan untuk memperkuat temuan-temuan peneliti di lapangan.

2.8 Teknik Penentuan Informan

Penelitian ini menggunakan *Nonprobability Sampling*, yaitu suatu prosedur penarikan sampel yang bersifat subjektif, dalam hal ini probabilitas pemilihan elemen-elemen populasi tidak dapat ditentukan. Teknik yang digunakan adalah *purposive sampling*, dimana sampel dipilih karena dianggap dapat memberikan informasi yang paling relevan dan mendalam terkait dengan penelitian ini.

2.9 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang ditempuh peneliti untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dipilih adalah teknik triangulasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dari beberapa teknik dan sumber data. Untuk itu, ada beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti, yaitu:

1. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam dilakukan dengan bertemu langsung informan kunci untuk memperoleh data yang dibutuhkan untuk menjawab pokok masalah penelitian. Teknik wawancara dilakukan secara formal dan informal. Wawancara formal adalah wawancara terstruktur dimana peneliti telah menyiapkan sejumlah daftar pertanyaan secara berurutan untuk ditanyakan ke informan utama. Sementara wawancara informal dilakukan kepada pihak-pihak terkait untuk mengetahui efektivitas sistem peringatan dini terhadap pengurangan resiko bencana gempa bumi. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan beberapa kelompok utama, yaitu:

- a. **Kepala keluarga** untuk memahami dampak bencana terhadap kehidupan mereka, termasuk aspek sosial, ekonomi, dan emosional.
- b. **Tokoh masyarakat**, seperti pemimpin adat, pemuka agama, dan ketua RT/RW, untuk mendapatkan pandangan tentang dinamika komunitas, strategi pemulihan, dan peran nilai-nilai budaya dalam adaptasi pascabencana.

- c. **Pihak terkait lainnya**, termasuk aparat desa dan perwakilan LSM, untuk memperoleh informasi tentang koordinasi bantuan, program pemulihan, dan tantangan yang dihadapi selama proses tersebut.

Wawancara mendalam memberikan wawasan tentang bagaimana individu dan kelompok memaknai pengalaman mereka serta membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau hambatan dalam proses pemulihan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui dokumen tertulis, video, dan foto atau gambar. Seperti makalah, jurnal, koran, media elektronik dan media online serta catatan tertulis lainnya. Adapun dokumen foto atau gambar diperoleh melalui kamera handphone, banner, pamflet, baliho, media sosial. Studi dokumentasi ini ditempuh dengan mengumpulkan informasi dan keterangan tentang yang relevan dengan topik penelitian untuk memperkuat hasil temuan di lapangan.

3. Observasi

Teknik observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi yang bersifat pasif dan tidak langsung. Observasi pasif dan tidak langsung dilakukan dengan mendatangi lokasi penelitian dan mewawancarai informan namun tidak terlibat dalam kegiatan yang dilakukan informan tersebut, sehingga peneliti hanya mengamati, memaknai dan merasakan situasi yang ada di lokasi dan kondisi yang dialami dan dirasakan informan terkait dengan topik penelitian.

2.10 Teknik Analisis dan Validasi Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengikuti model Miles dan Huberman yang dilakukan dengan cara mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini data yang terkumpul direduksi menjadi data yang hanya berhubungan dengan topik penelitian. Data yang sudah direduksi kemudian dianalisis dan dijelaskan dalam penyajian data secara naratif. Dari penyajian data tersebut dibuatkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan rumusan penelitian dengan bukti- bukti yang valid, terpercaya dan obyektif di lapangan. Langkah-langkah yang akan dilakukan adalah: Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang digunakan mengacu pada langkah-langkah analisis data yang diuraikan oleh Sugiyono (2012), yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Berikut adalah penjelasan setiap tahap:

1. Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu:
 - a. **Observasi**: Peneliti mengamati secara langsung kondisi sosial ekonomi masyarakat Dusun Aholeang pasca bencana gempa bumi.

- b. **Wawancara Mendalam:** Dilakukan dengan tokoh masyarakat, kepala keluarga, dan pihak terkait untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengalaman mereka.
 - c. **Dokumentasi:** Mengumpulkan data sekunder seperti laporan resmi, artikel media, dan dokumen lain yang relevan.
2. **Reduksi Data:** Data yang diperoleh dari lapangan kemungkinan besar beragam dan tidak semuanya relevan dengan fokus penelitian. Oleh karena itu, langkah ini melibatkan seleksi, penyederhanaan, dan klasifikasi data berdasarkan isu utama yang telah dirumuskan. Reduksi data bertujuan untuk menyaring informasi yang benar-benar mendukung modal sosial dan rekonstruksi sosial ekonomi masyarakat Aholeang.
 3. **Penyajian Data:** Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang terstruktur. Penyajian ini mencakup laporan tertulis hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami temuan penelitian secara sistematis. Visualisasi data, seperti tabel atau diagram, juga dapat digunakan untuk mendukung interpretasi.
 4. **Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan.** Tahap terakhir adalah verifikasi data untuk memastikan validitas temuan. Peneliti melakukan refleksi mendalam terhadap data yang telah disusun untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Kesimpulan yang dihasilkan mencerminkan interpretasi berdasarkan data yang telah dianalisis secara kritis, memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang telah ditentukan.

Untuk memastikan validitas dan keakuratan data, penelitian ini menggunakan metode triangulasi, yaitu membandingkan dan memadukan informasi yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data. Misalnya, informasi tentang kondisi ekonomi masyarakat yang diperoleh dari wawancara akan dibandingkan dengan data yang ditemukan dalam dokumen resmi atau observasi di lapangan. Triangulasi data membantu mengurangi bias dan meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian.

2.11 Daftar Pustaka

- Adger, W.N., 2003. Social capital, collective action, and adaptation to climate change. *Economic Geography*, 79(4), pp.387–404.
- Aldrich, D.P. and Meyer, M.A., 2015. Social capital and community resilience. *American Behavioral Scientist*, 59(2), pp.254–269.
- Aldrich, D.P., 2012. *Building resilience: Social capital in post-disaster recovery*. Chicago: University of Chicago Press.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 2021. *Laporan Respons Darurat Bencana Gempa Bumi M6,2 di Sulawesi Barat Tahun 2021*. Jakarta: BNPB.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Majene, 2022. *Kecamatan Malunda dalam Angka 2022*. Majene: BPS Kabupaten Majene.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat, 2021. *Provinsi Sulawesi Barat dalam Angka 2021*. Mamuju: BPS Sulawesi Barat.
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. Richardson (Ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (pp. 241-258). Greenwood Press.
- Bourdieu, P., 1986. The forms of capital. In: J. Richardson, ed., *Handbook of theory and research for the sociology of education*. New York: Greenwood, pp.241–258.
- Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital. *American Journal of Sociology*, 94(Suppl), S95-S120. <https://doi.org/10.1086/228943>.
- Coleman, J.S., 1988. Social capital in the creation of human capital. *American Journal of Sociology*, 94(Supplement), pp. S95–S120.
- Dynes, R.R., 2006. Social capital: Dealing with community emergencies. *Homeland Security Affairs*, 2(2), pp.1–26.
- Field, J., 2003. *Social capital*. London: Routledge.
- Fukuyama, F. (1995). *Trust: The social virtues and the creation of prosperity*. Free Press.
- Granovetter, M., 1973. The strength of weak ties. *American Journal of Sociology*, 78(6), pp.1360–1380.
- Harwitasari, D. and van Ast, J.A., 2011. Climate change adaptation in practice: people's responses to tidal flooding in Semarang, Indonesia. *Journal of Flood Risk Management*, 4(3), pp.200–209.
- Hasbullah, J. (2006). *Social capital: Menuju keunggulan budaya manusia Indonesia*. MR-United Press.
- Helliwell, J.F. and Putnam, R.D., 2004. The social context of well-being. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 359(1449), pp.1435–1446.
- Irdansyah, Meiyani, Eliza. (2018). REKONSTRUKSI SOSIAL EKONOMI (STUDI BUMDES SEBAGAI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DESA

SANGIANG KABUPATEN BIMA). *Equilibrium: Jurnal Sosiologi Pendidikan*. Vol. VI. Issu 2. Juli-Desember 2018. 119-124.

Koentjaraningrat, 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 2020. *Kajian Sosial dan Budaya dalam Penanggulangan Bencana di Wilayah Timur Indonesia*. Jakarta: LIPI.

Miles, M.B., Huberman, A.M. and Saldaña, J., 2014. *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. 3rd ed. Thousand Oaks: SAGE Publications.

Mutahar, Farhan. (2023). *Tesis: Hubungan Modal Sosial Dengan Kesejahteraan Generasi Milenial Pada Masa Pandemi Covid-19*. Universitas Hasanuddin.

Narayan, D., & Pritchett, L. (1999). CENTS AND SOCIABILITY: HOUSEHOLD INCOME AND SOCIAL CAPITAL IN RURAL TANZANIA. *Economic Development and Cultural Change*, 47(4), 871-897. <https://doi.org/10.1086/452436>.

Nurul Angriani, Bitu. (2024). *Tesis: Strategi Nafkah Berkelanjutan Menggunakan Pendekatan Modal Sosial Pada Komunitas Pemulung Di Tpa Antang Kota Makassar*. Universitas Hasanuddin.

Pemerintah Kabupaten Majene, 2021. *Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Sulawesi Barat 2021*. Majene: BPBD Majene.

Pusat Studi Bencana Universitas Gadjah Mada (PSBA UGM), 2021. *Evaluasi Penanganan Gempa Bumi Sulawesi Barat 2021: Perspektif Lokal dan Kelembagaan*. Yogyakarta: PSBA UGM.

Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.

Putnam, R.D., 2000. *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. New York: Simon & Schuster.

Quarantelli, E.L., 2005. Catastrophes are different from disasters: Some implications for crisis planning and managing drawn from Katrina. *Understanding Katrina: Perspectives from the Social Sciences*, Social Science Research Council.

Rahmadi, Wawan. (2022). *Tesis: Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Korban Bencana Gempa Bumi Di Kabupaten Mamuju*. Universitas Hasanuddin.

Sahrul, M., 2022. Ketahanan sosial masyarakat pasca bencana di Sulawesi Barat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Kebencanaan*, 5(1), pp.45–60.

Santoso, T. (2020). *Memahami modal sosial*. Universitas Indonesia Press.

Sayuti, R. H., et al. (2024). *Modal sosial dan pembangunan masyarakat*. Pustaka Bangsa.

Suharto, E., 2009. *Pembangunan, kebijakan sosial, dan pekerjaan sosial: Analisis terhadap kondisi objektif, kebijakan dan profesi*. Bandung: Refika Aditama.

Syamsuddin, A., 2021. Peran komunitas lokal dalam membangun ketangguhan pasca gempa Sulbar. *Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan*, 23(2), pp.102–117.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Republik Indonesia.

Wahyuni, L. and Yusran, M., 2021. Strategi adaptasi masyarakat adat Sulawesi Barat dalam menghadapi bencana. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 42(3), pp.198–212.

Wijayanti, et al. (2020). MODAL SOSIAL SEBAGAI STRATEGI PEMULIHAN PASCA GEMPA DI DESA GONDANG. *Jurnal Ilmu Sosial*, 15(2), 110-140.

Woolcock, M. and Narayan, D., 2000. Social capital: Implications for development theory, research, and policy. *The World Bank Research Observer*, 15(2), pp.225–249.

Yin, R.K., 2018. *Case study research and applications: Design and methods*. 6th ed. Thousand Oaks: SAGE Publications.

Yoshinta, N. (2023). PEMBERDAYAAN KELOMPOK EKONOMI PEREMPUAN SEBAGAI STRATEGI REKONSTRUKSI SOSIAL-EKONOMI PASCA BENCANA. *Jurnal Ekonomi & Sosial Masyarakat*, 21(3), 259-274.

Zullam, et al. (2020). REKONSTRUKSI SOSIAL-EKONOMI PASCA BENCANA: PERAN MODAL SOSIAL DALAM PEMULIHAN MASYARAKAT. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 18(1), 112-132.